



Judul : Rancangan KUHP, pembahasan di DPR segera dimulai
Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

RANCANGAN KUHP

Pembahasan di DPR Segera Dimulai

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah telah merampungkan daftar inventarisasi masalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau DIM RKUHAP. Pembahasan RKUHAP antara pemerintah dan DPR bisa dimulai setelah reses DPR berakhir pada 23 Juni.

Informasi telah tuntasnya penyusunan DIM RKUHAP oleh pemerintah disampaikan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada Habiburrokhman, Ketua Komisi III DPR. Habiburrokhman lantas menginformasikannya saat rapat dengan pendapat umum (RDPU) dengan akademisi Universitas Borobudur dan Komunitas Advokat Pengawal RKUHAP di Kompleks Parlemen, Rabu (18/6/2025).

"Saya tadi ditelepon Pak Dasco, DIM yang dari pemerintah alhamdulillah sudah ada," katanya.

Di tengah masa reses DPR saat ini, Komisi III DPR tetap membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan RKUHAP. Forum RDPU dijadwalkan berlangsung pada 17-20

Juni 2025 dengan menghadirkan berbagai pihak. Secara resmi, DPR akan mulai bersidang kembali pada 24 Juni 2025.

Komisi III DPR menargetkan pembahasan RKUHAP dapat dimulai di awal masa sidang mendatang dan selesai dalam waktu maksimal dua kali masa sidang atau sebelum akhir tahun ini.

Percepatan pembahasan RKUHAP, menurut Habiburrokhman, mendesak mengingat sistem hukum acara pidana masih menyisakan ketimpangan antara warga yang berhadapan dengan hukum dan aparat penegak hukum. KUHP yang berlaku saat ini, yang terbit pada 1981, belum memberikan ruang perlindungan yang memadai terhadap warga negara, terutama dari kalangan tidak mampu.

Tunggu paraf

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membenarkan bahwa DIM RKUHAP dari pemerintah telah rampung. Saat ini prosesnya tinggal menunggu paraf persetujuan dari institusi lainnya, seperti Kapolri, Jaksa Agung, dan

Ketua Mahkamah Agung.

"Tanggal 23 kami finalisasi. Secara prinsip sudah selesai semua, tinggal menunggu paraf," ujarnya.

Ia menambahkan, penyusunan naskah RKUHAP telah melewati proses panjang dan melibatkan banyak masukan dari publik. Pembahasan di DPR diharapkan dapat segera dimulai setelah DIM RKUHAP diserahkan pemerintah.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengingatkan pentingnya prinsip partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi RKUHAP.

Menurut dia, DPR perlu menjelaskan pasal demi pasal dalam RKUHAP dengan menunjukkan pertimbangan politik hukum yang dipakai, termasuk alasan di balik pengambilan atau penolakan masukan publik. Dengan demikian, ada ruang bagi publik untuk menilai arah pembaruan hukum acara pidana dan dampaknya terhadap sistem peradilan pidana secara menyeluruh. (BOW)